

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYRAKAT MISKIN PERKOTAAN DI KABUPATEN SIKKA**

MUHAMMAD SAIBIL

Nomor Stambuk : 105641100717



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH M AKASSAR**

2023

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYRAKAT MISKIN PERKOTAAN DI KABUPATEN SIKKA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**



Disusun Dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SAIBIL

NIM : 105641100717

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0005/SK-Y/65201/091004/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Kamis 20 Juli 2023.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730 772


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si
3. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP


(.....)


(.....)

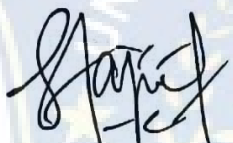

(.....)

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan
Masyarakat Miskin Perkotaan Di Kabupaten Sikka
Nama Mahasiswa : Muhammad Saibil
Nomor Induk Mahasiswa : 105641100717
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

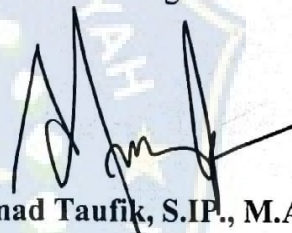
Menyetujui,

Pembimbing I



Hamrun, S.IP., M.SI

Pembimbing II



Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

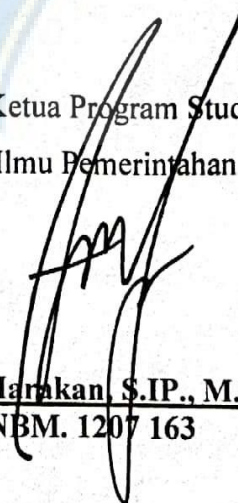


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.SOS., M.SI

NBM. 730 727

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan



Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saibil
Nomor Induk Mahasiswa : 105641100717
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kabupaten Sikka” adalah sepenuhnya karya ilmiah sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 21 Juni 2023



Muhammad Saibil

ABSTRAK

Muhammad Saibil.2023 Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kabupaten Sikka (dibimbing oleh Hamrun dan Ahmad Taufik)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif adapun sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, informan pada penelitian ini berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi, Teknik pengabsahan data triangulasi sumber, triangulasi Teknik, triangulasi waktu, Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Strategi Tradisional pemerintah kabupaten Sika dalam pemberdayaan masyarakat miskin, Dinas Sosial transparansi dalam melaksanakan progam PKH baik dalam pendataan masyarakat sampai dengan pada penyaluran bantuan kepada masyarakat. 2). Strategi Aksi Langsung (*Direct-Action*) Strategi langsung dinas sosial turun langsung dalam melakukan pendataan kepada masyarakat dengan melihat berdasarkan kategori-kategori yang telah di tentukan pemerintah pusat 3). Strategi Transformatif Dinas Sosial PKH dalam memberikan hak masyarakat khususnya pada pelajar dengan memberikan bantuan sesuai dengan tingkat Pendidikan. Faktor penghambat strategi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kabupaten sikka ada dua yaitu pendataan dan keterbatasan SDM sedangkan faktor pendukungnya yaitu Peran Pendamping PKH dan ketersediaan dana.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan, PKH

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,,,

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan Di Kabupaten Sikka”** yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama dan paling utama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua Orang Tua penulis, Bapak Muhiding dan

Ibu Arwa yang senantiasa menanamkan harapan dengan memberi semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tiada henti dengan tanpa pamrih.

Tidak lupa pula penulis menghaturkan terimakasih kepada Kakanda Jumaldin dan Kakanda Sahrul yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini, kepada Adik Ismail dan jugan Adik Risna dan juga kepada kedua Kaka Ipar, Nita dan juga Citra yang selalu Canggih dengan memberikan dukungan dan doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu, terimakasih juga kepada kedua ponakan yang sedang lucu-lucunya Adinda Ashila dan Adinda Jiyad, yang dengan kelucuan tersebut seolah-olah menuntut penulis untuk menuntaskan studi dengan segera dan kembali untuk kebersamai mereka semua. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Hamrun, S.IP., M.SI selaku pembimbing I (satu) dan juga Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.HI
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.

4. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Teman-teman kelas IP A⁰¹⁷ yang selalu Canggih Kuadrat dengan senantiasa memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Pemerintah Kabupaten Sikka (Dinas Sosial) dan Jajarannya, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
7. Teman-teman IP⁰¹⁷ yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 29 Juni 2023



Muhammad Saibil

DAFTAR ISI

Penerima Tim	Error! Bookmark not defined.
Halaman Persetujuan.....	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	31
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Teknik Pengabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengarah kepada pemberian otonomi untuk setiap daerah dalam usaha membangun daerah dengan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Tujuan dari otonomi yang diberikan agar daerah memiliki keleluasaan (*disrectionary power*) untuk menyelenggarakan pembangunan daerah.

World Bank mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik dari komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri. (World Bank, 2002).

Ditinjau dari kelompok sasaran, terdapat beberapa tipe kemiskinan. Penggolongan tipe kemiskinan ini dimaksudkan agar setiap tujuan program memiliki sasaran dan target yang jelas. (Sumodiningrat 1999) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
2. Kemiskinan relatif, situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas.
3. Kemiskinan struktural, kemiskinan ini terjadi saat orang tua atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut.

United Nation Development Program (UNDP) meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, kemiskinan ekstrim (*extreme peverty*) atau kemiskinan absolut adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, kemiskinan secara umum (*overall poverty*) atau sering di sebut sebagai kemiskinan relatif adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi dan tempat bernaung (UNDP, 2000)

Kemiskinan di Indonesia adalah kasus dan permasalahan sosial yang selalu menjadi kajian yang tidak pernah selesai, kemiskinan selalu menjadi perhatian dari pemerintahan Indonesia, baik pusat maupun daerah. Kemiskinan dapat menyebabkan efek yang cenderung menyebar (*multiplier effects*) bagi

kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dimana kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu untuk dipenuhi. Sehingga keanekaragaman persoalan kemiskinan memerlukan upaya penyelesaian dan pencegahan yang lengkap dan menyeluruh, mencakup berbagai macam aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik. dan keluarga harapan, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pengadaan rumah murah sebagai program Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), (Indonesia, 2009).

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik. Ini mengandung maksud bahwa program satu dengan yang lain saling mendukung, sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik (Undang-undang, 2000).

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya meliputi satu aspek saja. Kemiskinan muncul karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Demikian pula dengan pemberdayaan masyarakat, bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang. (Bhinadi 2017). mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: 1). Memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; 2). Usaha untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Menurut Thohir (2008), kemiskinan adalah kondisi yang secara umum menggambarkan seseorang atau suatu rumahtangga atau komunitas yang berada dalam serba kekurangan, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan yang paling dasar. Akibat dari itu, yang bersangkutan mengalami berbagai keterbatasan baik terhadap peran-peran yang secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang harus dilakukan. Keterbatasan-keterbatasan seperti itu timbul, bias karena akibat dari internal individu atau rumahtangga yang gagal beradaptasi terhadap lingkungan atau di dalam merespon perubahan. Pada saat yang sama, dapat saja terjadi sebaliknya, yaitu lingkunganlah yang melahirkan kemiskinan (Alan, 2001).

Berdasarkan pada fakta sosial, orang miskin bisa terjadi karena berbagai alasan. Bisa karena kemiskinan adalah pilihan, tetapi yang terbanyak adalah karena keterpaksaan. Orang miskin dari tipologi ini, bisa banyak penjelasannya. Dari sudut kepribadian, biasanya karena tidak memiliki orientasi hidup, cita-cita hidup, dan rencana-rencana masa depan yang

memadai. Pekerjaan (jika sudah bekerja) ditempatkan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan dasar hari ini. Masa depan adalah soal nanti. Orang-orang seperti ini biasanya tidak memiliki potensi untuk mengantisipasi apalagi melakukan proaktif terhadap perubahan. Mereka biasanya pasif atau sekedar reaktif terhadap perubahan, sehingga hampir selalu menjadi pihak yang kalah dalam persaingan atau tergilas oleh perubahan itu sendiri. (Thohir, 2008).

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable*. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi alternatif dalam pembangunan yang telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya (Azizah Zuhrotul, 2021).

Pemberdayaan merupakan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin mampu memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain. Pemberdayaan menumbuhkan jiwa kemandirian dan kreativitas untuk berkembang dengan kekuatan sendiri, tidak tergantung pada bantuan dan perintah dari atas sebagaimana yang ada pada kebijakan sentranlistik. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pola pendekatan yang bersifat botton-up yang bertujuan menggerakkan potensi masyarakat. Selanjutnya yang akan dicapai lewat pemberdayaan ini adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat di daerah. (Zuliyah, S. 2010).

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena yang menjadi subjek dari pemberdayaan adalah masyarakat desa itu sendiri, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. (Nikmatullah & Nurmayasari 2015).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka mencapai 43.090 jiwa selama tahun 2021, angka ini mengalami peningkatan sebanyak 910 jiwa dari tahun 2020 dengan jumlah 42.180 jiwa. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin 44.020 jiwa, menurun pada tahun 2019 sebanyak 43.320 jiwa. Angka ini menurun lagi pada tahun 2020 yakni 42.180 jiwa, lalu meningkat menjadi 43.090 jiwa pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, 2021).

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kemiskinan di Kabupaten Sikka setelah mengalami penurunan di dua tahun sebelumnya, permasalahan kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi yang tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah serta adanya pandemi yang berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga kemiskinan kembali mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk megkaji permasalahan yang terjadi dengan judul “**Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka**” dimana penelitian ini berfokus pada pemberdayaan Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.

D. Manfaat Penelitian

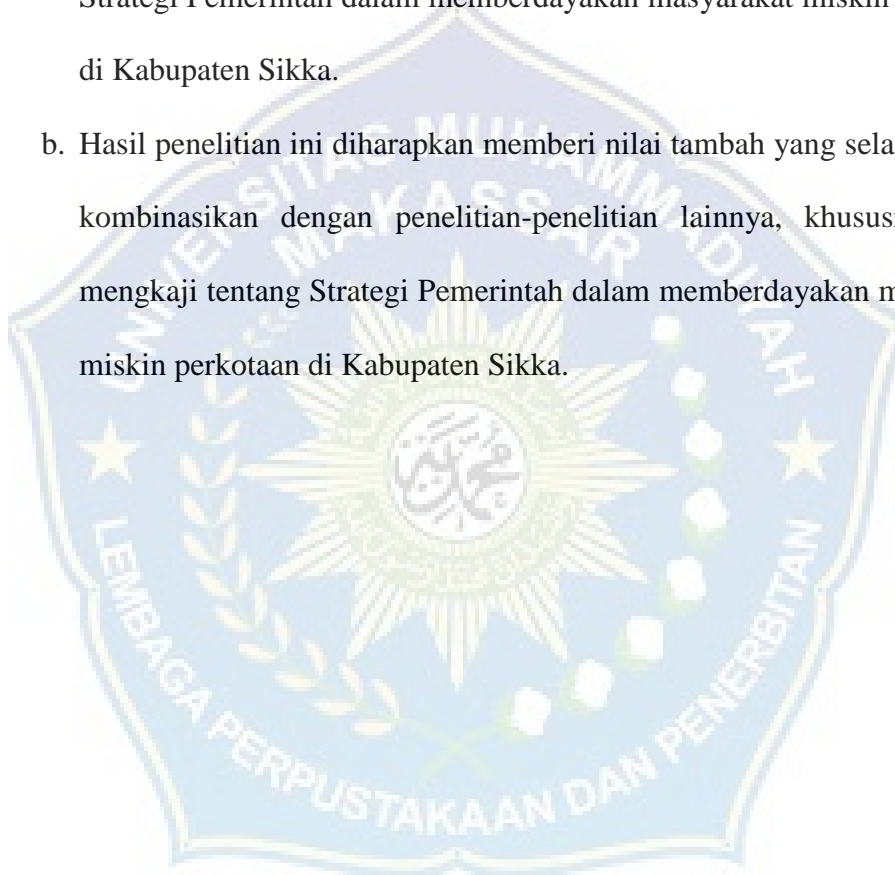
1. Secara teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.

b. Memberikan masukan terhadap pemerintah dalam penerapan Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan dalam penerapan Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya di kombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya, khususnya yang mengkaji tentang Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian yang menguraikan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan pendapat dan hasil penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu pada penelitian ini:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	(Khausar, 2012)	Mengatasi Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat	Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, banyak ditemukan dinegara-negara yang sedang berkembang termasuk negara Indonesia salah satunya. Telah banyak kebijakan pemerintah yang digulirkan untuk mengatasi kemiskinan seperti program IDT, P2KP, Askeskin, kompesasi BBM, PPK dan lain-lain, tetepi belum membuahkan hasil yang maksimal, bahkan angka kemiskinan dipredikasi akan terus meningkat apabila harga BBM naik lagi, dimana kenaikan harga BBM diikuti oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan angka pengangguran meningkat.

			<p>Kenyataan di daerah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak tepat sasaran karena berbagai hal seperti kondisi kemiskinan dipolitisir sebagai lahan bisnis kemanusiaan yang menjanjikan atau program yang diterapkan bersifat parsial, residual dan karitatif. Untuk itu penanggulangan kemiskinan di daerah perlu ditata dan dikoordinir secara baik agar tujuan tercapai secara maksimal.</p>
2.	(Rahaba V.P.B, 2021)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Oleh pemerintah desa di tengah pandemi Covid-19	<p>Pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi dan kemampuan yang mereka miliki untuk secara mandiri menemukan solusi dari permasalahan sehari-hari yang mereka temui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan</p>

			<p>bahwa dari segi pemberian tanggung jawab dan wewenang sudah berjalan dalam memberdayakan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan serta adanya program pemberdayaan; dari segi menciptakan kondisi saling percaya antara pemerintah dan masyarakat sudah terbangun dengan baik; dan dari segi employee involvement sudah dilakukan dengan baik dengan adanya pelibatan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan.</p>
3.	(M, 2020, p. Muhammad Faisal)	Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan Studi Pada rumah berpenghasilan rendah di makassar	<p>Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor penyebab kemiskinan perkotaan: alamiah, budaya, dan struktural. Model pemberdayaan dilaksanakan dengan memahami permasalahan yang dihadapi, menyusun strategi pemecahan masalah, memahami pentingnya melakukan perubahan yang terencana, dan memperkuat kapasitas masyarakat miskin perkotaan.</p>

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun perbedaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada Strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin kota di Kabupaten Sikka.

B. Landasan Teori

Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Arti lain dari landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis mengenai berbagai variabel di dalam sebuah penelitian.

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Ilham 2020). Kemudian pendapat selanjutnya yang bedampingan dengan pendapat Ilham. “Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan- tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan

menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh” (Ilham 2020). Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa strategi ialah sebagai rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini bisa meliputi tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu kearah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan juga memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*corecompetencies*) (Napitupulu, 2022).

Berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, dalam pandangan yang berbeda Suhendra melihat strategi pemberdayaan masyarakat dalam beberapa tehnik pemberdayaan masyarakat sebagai berikut;

- a. *Participatory Rural Appraisal* (PRA), merupakan pengkajian masyarakat desa secara partisipatif yang dilaksanakan melalui sebelas prinsip yaitu:

1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan).
 2. Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat.
 3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator.
 4. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan.
 5. Prinsip santai dan informal.
 6. Prinsip triangulasi.
 7. Prinsip mengoptimalkan hasil.
 8. Prinsip orientasi praktis.
 9. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu.
 10. Prinsip belajar dari kesalahan.
 11. Prinsip terbuka.
- b. Metode partisipasi *assesment* dan rencana, Metode pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menemukan masalah.
Dalam langkah ini diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi kondisi, situasi dan masalah sosial disekitar lingkungan masyarakat setempat.
 2. Menemukan potensi.
Potensi yang memungkinkan dimiliki masyarakat adalah berupa potensi rumah tangga setiap keluarga, waktu-waktu yang dapat digunakan secara produktif, sarana dan prasarana serta berbagai jenis pelayanan umum dari pemerintah, swasta maupun LSM, sistem nilai masyarakat dan kebiasaan mengambil keputusan.

Potensi-potensi tersebut merupakan sumberdaya yang dapat dikelola secara optimal guna mengatasi permasalahan sosial ataupun untuk pengembangan masyarakat setempat.

3. Menganalisis masalah dan potensi

Dapat berupa kegiatan-kegiatan mengkaji berbagai masalah, penyebabnya, hubungan kausalitas dan fokusnya, mencari prioritas masalah, faktor pendukung maupun penghambat. Kemudian mengkaji potensi yang ada untuk memecahkan masalah.

4. Memilih solusi pemecahan masalah

Berupa kegiatan mencegah timbulnya masalah lebih jauh, memobilisasi sistem sumber dan potensi, menentukan alternatif pemecahan masalah, pertemuan masyarakat untuk menentukan skenario tindakan.

c. Metode loka karya, merupakan metode yang efektif untuk memotivasi anggota peserta menyampaikan aspirasi dan kreativitas. Manfaat yang diperoleh dari metode ini adalah ditemukannya suatu konsensus dan mengambil keputusan untuk suatu fokus permasalahan secara musyawarah.

d. Teknik *brainstorming*, yaitu teknik yang dapat memotivasi untuk munculnya kreativitas anggota dalam memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi.

e. CO-CD (*Community Organization-Community Development*), teknik ini dijelaskan secara terpisah dimana CO merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu penyesuaian yang efektif antara sumber sumber dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkup daerah tertentu. Sedangkan CD merupakan teknik yang mengupayakan memajukan kesatuan-kesatuan masyarakat. CD digunakan sebagai upaya memperbaiki kondisi pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat, kebutuhan materil dan nonmateril dalam daerah-daerah yang agraris dan perekonomiannya belum maju (Suhendra, 2006).

b. Tahapan Strategi

Strategi tidak cukup hanya perumusan konsep dan implementasi terhadap strategi tersebut, dalam strategi juga dibutuhkan evaluasi terhadap strategi yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Dalam teori manajemen *strategic* terdapat tiga tahapan strategi yang dikemukakan oleh (Fred R David 2016, diantaranya:

1. Perumusan Strategi

Perumusan Strategi merupakan tahapan pertama dalam strategi. Dalam tahap ini para pencipta, perumus, penkonsep harus berpikir matang mengenai kesempatan dan ancaman dari luar perusahaan dan menetapkan kekuatan dan kekurangan dari dalam perusahaan, serta menentukan sasaran yang tepat. Menghasilkan strategi cadangan dan memilih strategi yang akan di laksanakan. Dalam perumusan strategi

berusaha menemukan masalah-masalah di dalam perusahaann. Setelah itu dilakukan analisis tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk keberhasilan menuju tujuan strategi tersebut.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi termasuk pengembangan budaya dalam mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengubah arah, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan system informasi yang masuk.

Implementasi strategi sering di sebut sebagai tindakan dalam strategi karena implementasi berarti memobilisasi untuk mengubah strategi yang dirumuskan untuk menjadi tindakan. Menetapkan tujuan, melengkapi kebijakan, mengalokasikan sumber daya dan mengembangkan budaya yang mendukung strategi merupakan usaha yang dilakukan dalam mengimplementasikan strategi. Implementasi yang sukses memerlukan dukungan disiplin, motivasi, dan kerja keras. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan organisasi.

3. Evaluasi Strategi

Tahapan terakhir ini merupakan tahapan yang diperlukan karena dalam tahap ini keberhasilan yang telah dicapai dapat di ukur kembali untuk penetapan tujuan (Aprilia, 2018).

Menurut Hikmat (2006) ada 3 (tiga) strategi utama yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Strategi tradisional, strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan atau dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi aksi langsung (*direct-action*), strategi ini memerlukan dominasi kepentingan yang dihormati semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif, strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu ikut pula berpartisipasi. Pada intinya kata kunci dari pemberdayaan meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif memperbaiki situasi dan kondisi sendiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable*. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi alternatif dalam pembangunan yang telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya (Azizah Zuhtratul, 2021).

Menurut Saraswati pemberdayaan secara konseptual mencakup enam hal berikut;

1. *Learning by doing.*

Secara konseptual pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses belajar melalui suatu tindakan-tindakan yang konkrit, yang terus menerus dan dampaknya dapat terlihat. Hal ini menjelaskan pula bahwa pemberdayaan bukanlah suatu kegiatan yang instan namun kegiatan yang membutuhkan waktu panjang dan kedisiplinan untuk dapat menghasilkan suatu keberdayaan.

2. *Problem solving.*

Pemberdayaan dalam hal ini berarti kegiatan yang didalamnya mencakup pemecahan masalah yang krusial dengan efektif dan efisien.

3. *Self evaluation.*

Pemberdayaan yang dilakukan, harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Hal

ini berarti juga dalam pemberdayaan individu atau kelompok harus mampu menganalisis sendiri apa apakah hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan.

4. *Self development and coordination.*

Pemberdayaan diartikan suatu kegiatan yang harus mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.

5. *Self selection.*

Secara konseptual pemberdayaan adalah kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah kedepan.

6. *Self decisim.*

Didalam pemberdayaan memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (Huraerah, 2008)

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai suatu proses sosial yang bergerak secara dinamis dengan melibatkan partisipasi aktif serta kerja sama yang baik antara tenaga fasilitator, pemerintah dan kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan maka dapat di jelaskan apabila pada dasarnya tujuan proses pemberdayaan itu untuk menciptakan perubahan kehidupan sosial ekonomi di kalangan kelompok lapisan bawah masyarakat agar supaya mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dapat mandiri dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terencana, terprogram dan berkelanjutan dengan tujuan untuk:

1. Memperkenalkan berbagai konsep dan unsur inovasi yang lain baik itu berupa gagasan, perilaku maupun dalam bentuk hasil karya manusia yang sifatnya baru pada kelompok sasaran kegiatan.
2. Memberikan keterampilan dan membantu masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan secara mandiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi mereka.
3. Meningkatkan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu informasi yang mana di harapkan dengan semakin membaiknya pemahaman kelompok sasaran terhadap inovasi tersebut akan berdampak pada munculnya sikap serta perilaku mereka untuk bisa bekerja lebih kreatif dan inovatif.
4. Kalau pun sekiranya ada bantuan dalam bentuk modal untuk berusaha maka semua itu di maksudkan untuk lebih mendorong kreativitas kelompok sasaran agar mereka bisa bekerja mandiri dan tidak senantiasa mengharapkan bantuan orang lain.
5. Karena proses pemberdayaan masyarakat ini pada prinsipnya untuk membangun motivasi dengan memanfaatkan semua potensi yang di miliki oleh masyarakat maka mau tidak mau kegiatan yang di lakukan senantiasa mendapat bimbingan serta pengawasan dari tenaga

fasilitator agar supaya apa yang menjadi sasaran utama kegiatan tersebut dapat tercapai (Tinggi, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut pemberdayaan adalah suatu kegiatan berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif (Suhendra, 2006:74). Melalui cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

Lebih lanjut Suhendra menjelaskan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. (Suhendra, 2006 :75).

Menurut Craig dan Mayo mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep kemandirian (*self-help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*) dan pemerataan (*equity*) (Huraerah, 2008:82). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses pengembangan masyarakat agar masyarakat mampu mandiri, memiliki jaringan kerja dan berpartisipasi dalam pembangunan sehingga pemerataan dapat terwujud.

Terkait dengan pemerataan, pemberdayaan merupakan proses pemahaman atau breakdown dari hubungan atau relasi antara subyek (golongan berkuasa atau berdaya) dan obyek (golongan lemah). Proses ini mementingkan adanya “pengakuan” subyek akan “kemampuan” atau “daya” yang dimiliki obyek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subyek ke obyek. Pemberdayaan dalam konteks ini adalah suatu proses mengalirkan daya dan kemampuan dari kelompok yang kuat atau memiliki daya kepada kelompok yang lemah seperti masyarakat miskin, lansia, wanita dan anak-anak, dengan kata lain mengalirnya daya tersebut dapat dijadikan upaya bagi kelompok lemah untuk meningkatkan hidupnya. Mengacu pada pengertian tersebut, hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek yang baru sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antara subyek dengan subyek yang lain. Hal ini berarti proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi subyeksubyek (Moeljarto, 1996).

Pemikiran lain tentang pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh Sunyoto Usman yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian (Huraerah, 2008). Pengertian pemberdayaan masyarakat dalam hal ini lebih menekankan

pada upaya memberikan kesempatan atau peluang kepada masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki masyarakat.

c. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut (Hamid, 2018) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan, merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi, merupakan bagian dari program pengelolaan.

Pemberdayaan masyarakat juga membutuhkan pendekatan yang meliputi; pertama, pendekatan terarah artinya pemberdayaan masyarakat harus diarahkan, yaitu berpihak pada masyarakat miskin; kedua, pendekatan kelompok, artinya bersama-sama memfasilitasi pemecahan

masalah yang dihadapi; ketiga, pendekatan pendampingan, artinya dalam proses pembentukan dan pengorganisasian masyarakat miskin perlu didampingi oleh fasilitator profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisor terhadap kelompok untuk mempercepat pencapaian kemandirian (Primanto, 2020).

Menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat bahwa tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan, meliputi:

1. Tingkat kesadaran dan pembentukan perilaku. Perlu mengembangkan kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas diri. Pada tahap ini, pihak yang menjadi tujuan pemberdayaan harus menyadari perlunya perubahan untuk mengubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan kesadaran akan semakin membuka keinginan dan kesadaran akan kondisinya saat itu, sehingga dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan kesadaran ini dapat menggugah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.
2. Tahap transformasi pengetahuan dan keterampilan, dalam hal ini perlu diperoleh adanya pengetahuan dan keterampilan yang beragam untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Dengan pengetahuan dan keterampilan tersebut maka sasaran dari pemberdayaan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan

untuk mengubah potensinya menjadi nilai tambah. Jadi, pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan. Dalam peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan ini, pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang nantinya akan mengarahkan pada kemandirian. Secara keseluruhan bahwa menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kesadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan (Napitupulu, 2022).

3. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

World Bank mengkategori karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumahtangga dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain

dari karakteristik dari komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri. (World Bank 2002)

Ditinjau dari kelompok sasaran, terdapat beberapa tipe kemiskinan. Penggolongan tipe kemiskinan ini dimaksudkan agar setiap tujuan program memiliki sasaran dan target yang jelas. (Sumodiningrat 1999) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
2. Kemiskinan relatif, situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas.
3. Kemiskinan struktural, kemiskinan ini terjadi saat orang tua atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut.

United Nation Development Program (UNDP) meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, kemiskinan ekstrim (*extreme peverty*) atau kemiskinan absolut adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, kemiskinan secara umum (*overall poverty*) atau sering di sebut sebagai kemiskinan relatif adalah

kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi dan tempat bernaung (UNDP, 2000)

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, meliputi:

1. Menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin.
2. Kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari.
3. Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.
4. Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria, yaitu:
 - a) Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja.
 - b) Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir.
 - c) Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran.
 - d) Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir.
 - e) Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran.

- f) Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng.
- g) Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas.
- h) Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 VA atau bukan listrik.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi yang diderita manusia karena kekurangan atau tidak memiliki pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup, kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikemukakan oleh (Abdul Kahar, 2016). Kemiskinan dari segi kurang atau tidak memiliki aset, seperti rumah, tanah, peralatan, uang dan lain sebagainya (Reza A. N., 2022).

Menurut Thohir, kemiskinan adalah kondisi yang secara umum menggambarkan seseorang atau suatu rumahtangga atau komunitas yang berada dalam serba kekurangan, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan yang paling dasar. Akibat dari itu, yang bersangkutan mengalami berbagai keterbatasan baik terhadap peran-peran yang secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang harus dilakukan. Keterbatasan-keterbatasan seperti itu timbul, bias karena

akibat dari internal individu atau rumahtangga yang gagal beradaptasi terhadap lingkungan atau di dalam merespon perubahan. (Thohir, 2008),

b. Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk, Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
2. Angkatan kerja, Penduduk yang bekerja dan pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Batasan kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan negara lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum.
3. Tingkat pendidikan rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja.
4. Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadikan salah satu faktor kemiskinan (Yohana, 2019).

C. Kerangka Pikir

kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut kerangka pikir pada penelitian ini:



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan agar dapat membatasi penelitian dalam memilih data yang relevan dengan judul yang akan diteliti. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu berfokus pada “Strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka” pada Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Strategi tradisional, strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan atau dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi aksi langsung (*direct-action*), strategi ini memerlukan dominasi kepentingan yang dihormati semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif, strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.
4. Faktor penghambat dan faktor pendukung strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 22 November 2022 s/d 20 Januari 2023 setelah seminar proposal dilaksanakan, dan lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Sikka.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk melihat fenomena. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.

2. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia, penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, ataupun kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Arikunto 2010) ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli yaitu dari lembaga terkait dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti yaitu Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti dokumen atau catatan berupa laporan dari lembaga terkait.

D. Informan Penelitian

penelitian ini untuk menentukan sampel (Narasumber) wawancara, menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Narasumber dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka. Narasumber dalam penelitian ini ialah:

No	Nama	Jabatan
1.	Yustinus Kapitan	Koordinator PKH Kab Sikka
2.	Yustinus Y.Edison S.IP	Rencana Ahli Muda Sekertariat
3	Sumiati	Masyarakat
4.	Maswati	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Djaelani 2013) adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pengamatan/Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah terkait dengan strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.

2. Teknik Wawancara

Teknik yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan yang diambil sebagai sampel yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat tentang strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan yang telah dikemukakan oleh (Sarosa 2021).

Adapun langkah-langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

2. Penyajian Data

Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut (Sugiyono, 2013) antara lain:

1. Triangulasi Sumber.

Triangulasi Sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada ataupun

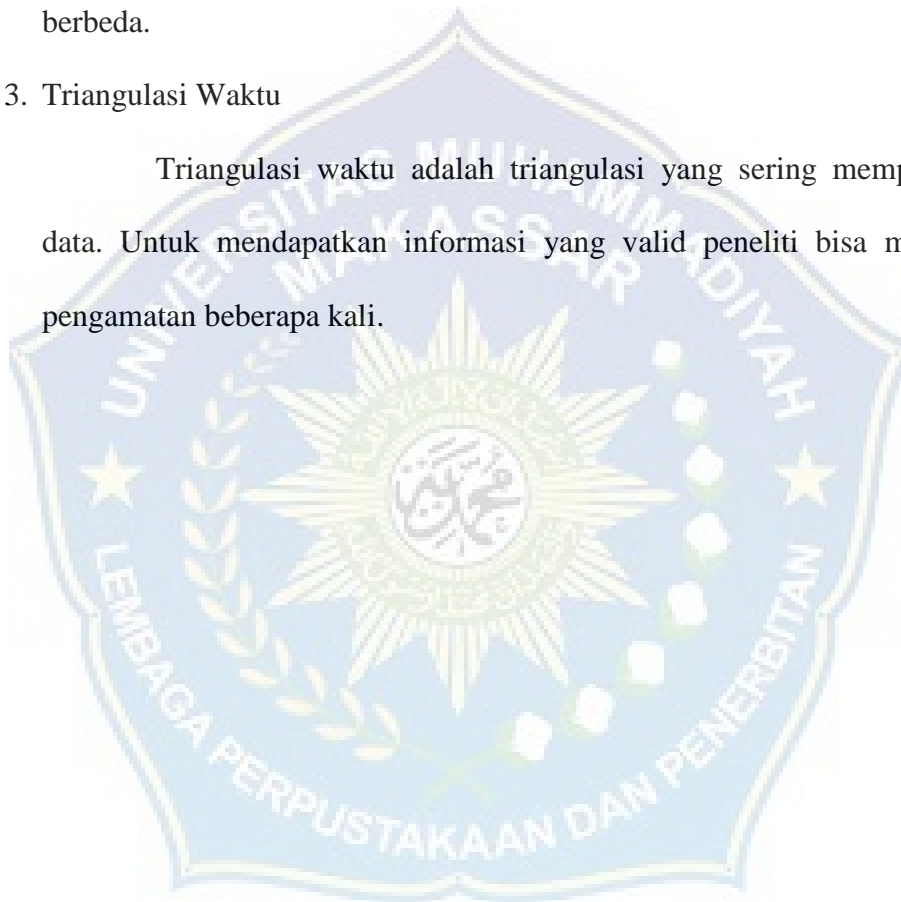
membandingkan hasil wawancara dari responden (Data Primer) dengan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka merupakan bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di daratan Flores, Ibu kota Kabupaten Sikka adalah Maumere. Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Sikka 7.553,24 Km² terdiri atas luas daratan (Pulau Flores) 1.614,80 km² dan pulau-pulau kecil sebanyak 18 buah 117,11 km² serta luas lautan 5.821,33 Km². Luas daratan Kabupaten Sikka dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka hanya sebesar 3,66% dari luas wilayah NTT atau seluas 47.349,91 km². Kabupaten Sikka terletak di antara 8°22'-8°50' Lintang Selatan dan 121°55'40"-122°41'30" Bujur Timur. Batas wilayah kabupaten sikka meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Flores.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Flores Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ende

Kabupaten Sikka memiliki 21 Kecamatan yang meliputi 147 Desa dan wilayah perkotaan di kabupaten sikka terdapat 3 Kecamatan yang meliputi kecamatan Alok, kecamatan Alok Barat, Alok Timur dan 11 Kelurahan terdiri dari kelurahan Kota Uneng, kelurahan Kabor, kelurahan Madawat, kelurahan Nangalimang, kelurahan Wailiti, kelurahan Wolomarang,

kelurahan Wuring, kelurahan Waioti, kelurahan Beru, kelurahan Wairotang dan Kota Baru.

Tabel : 4.1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut (Jiwa) Kecamatan		
	2019	2020	2021
Waigete	25 339,00	24 931,00	25 208,00
Waiblama	8 223,00	8074.00	8179.00
Paga	16308.00	16399.00	16474.00
Mego	13168.00	12939.00	13043.00
Tanawawo	8803.00	8926.00	8946.00
Lela	11835.00	11596.00	11621.00
Bola	11087.00	10797.00	10814.00
Doreng	12111.00	12002.00	12079.00
Mapitara	6815.00	6672.00	6706.00
Talibura	22830.00	22424.00	22618.00
Waiblama	8223.00	8074.00	8179.00
Kewapante	14747.00	14775.00	14906.00
Hewokloang	9499.00	8998.00	9072.00
Kangae	17864.00	18055.00	18220.00
Palue	9442.00	9497.00	9512.00
Koting	6538.00	6526.00	6540.00
Nelle	6116.00	6147.00	6180.00
Nita	22195.00	22748.00	22895.00
Magepanda	13097.00	12727.00	12848.00
Alok	31931.00	32629.00	32633.00
Alok Barat	21744.00	22294.00	22906.00
Alok Timur	32073.00	32797.00	32852.00
Sikka	321765.00	321953.00	324252.00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka (2022)

Dari gambaran profil Kabupaten Sikka dapat disimpulkan Kabupaten Sikka memiliki letak geografis yang subur dan strategis, Kabupaten Sikka kaya akan hasil alam dengan ekonomi penggerak masyarakat yang cenderung bekerja dalam bidang pertanian dan perikanan serta menjadi jalur lokasi distribusi tertinggi di daratan Flores yang menunjang dalam sektor perdagangan.

Adapun visi dan misi Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat menuju Sikka bahagia 2023”

b. Misi

“Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan mewujudkan reformasi birokrasi Formulasi”. Visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan hak-hak dasar upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
- 2) Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan

keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Sikka

a. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

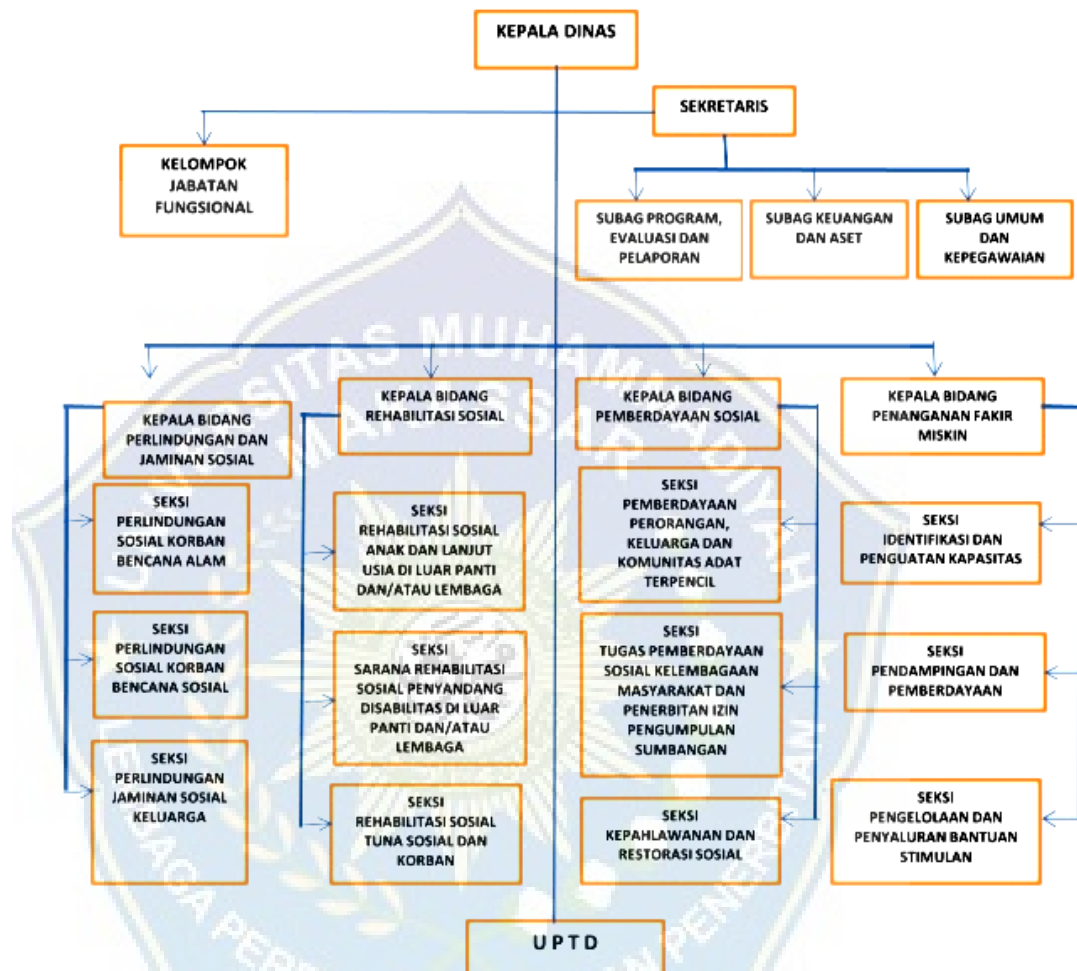
Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, Dinas Sosial merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Sosial sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dimaksud, maka Dinas Sosial Kabupaten Sikka mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Dinas.
2. Perumusan kebijakan umum dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan.
3. Penyediaan dukungan kerjasama antar dinas/badan tingkat kabupaten.
4. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelayanan umum.
5. Pembinaan bawahan dalam pencapaian program dinas.
6. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pada tahun berjalan.
7. Pembinaan umum dan pembinaan teknis.
8. Pelaksanaan sistem pengendalian interen.
9. Pengelolaan kesekretariatan dinas, dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Gambar : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sikka



Sumber : Data Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sikka (2022)

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka

Pemerintah memiliki beberapa strategi yang harus di jalani dalam memberdayakan untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan strategi tersebut, maka di tetapkan beberapa kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan berbagai strategi pemerintah. Kebijakan ditetapkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, sampai pada peraturan lebih rendah pada tingkat daerah.

Pemberdayaan merupakan pembangunan yang menekankan pada legitimasi kekuatan rakyat, yang bertumpu pada manusia dan kemanusiaan. Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (*participatory community empowerment*) merupakan pilihan strategi pembangunan yang banyak digunakan negara-negara yang ingin keluar dari krisis. Karena itu, sistem dan kekuatan ekonomi tidak lagi menjadi tumpuan pembangunan masyarakat.

Masalah sosial masyarakat saat ini sangat beraneka ragam, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya latar belakang pendidikan, budaya tempatan, mata pencaharian dan pola pikir serta gaya hidup masyarakat setempat. Beranjak dari kondisi yang beragam tersebut dalam suatu masyarakat akan menimbulkan jenis penanganan yang berbeda Ketika seseorang atau kelompok ingin melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kelebihan yang ada di suatu wilayah objek pelaksanaan program. Pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh siapapun, baik perorangan ataupun melalui lembaga pemerintah dan swasta. Pelaksanaan program tersebut biasanya disesuaikan dengan wilayah yang akan dijadikan objek pelaksanaan, tentunya dengan melihat perkembangan masyarakat selama ini.

Penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan Kabupaten Sikka menggunakan teori menurut Menurut Hikmat (H. 2006) yang meliputi; strategi tradisional, strategi aksi langsung (*direct-action*) dan strategi transformatif.

a. Strategi Tradisional

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan adalah untuk membantu masyarakat menjadi sejahtera dan bisa hidup layak agar mampu mewujudkan keinginan masyarakat itu sendiri. Namun masalah ekonomi menjadi hambatan masyarakat hingga saat ini, mereka tidak bisa hidup layak apabila ekonomi mereka rendah dan di bawah garis kesejahteraan.

Undang-undang No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1, Pasal 1, ayat (1) menyatakan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Sikka yaitu dengan adanya Program Keluarga Harapan yang disingkat menjadi PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH ini merupakan program yang cukup efektif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka menyelamatkan generasi penerus bangsa yakni melalui pendidikan dan Kesehatan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka perlu dikembangkan sebuah strategi pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan membantu mereka lebih berdaya, Pada penelitian ini strategi tradisional yang dimaksud yaitu Strategi agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan

mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. Persoalan kemiskinan sering dipahami sebagai suatu persoalan yang bersifat kompleks, multi dimensi, dan struktural sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat dalam menangani kemiskinan yang telah dilakukan maka perlu adanya strategi yang dilakukan pemerintah. Berikut hasil wawancara bersama YK Koordinator PKH kabupaten Sika

“Strategi Pemerintah kabupaten Sika melalui dinas sosial dalam menangani kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui PKH di lakukan dengan beberapa program salah satu nya melalui program bantuan pangan nontunai dengan dilakukan pendataan karena di setiap tahunnya selalu mengalami perubahan kemudian kami dalam mendata masyarakat diberikan kebebasan dengan ketentuan nantinya program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran“(Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)”

Selanjutnya di ungkapkan oleh YYE Rencana Ahli Muda Sekertariat

“Dalam pelaksanaan program PKH ini pemerintah kabupaten sika secara transparan membrikan informasi kepada masyarakat baik dalam proses penyaluran sampai pada proses pendataan kepada masyrakat, untuk program PKH sendri lebih fokus pada pemberian bantuan tunai kepada masyarakat kurang mampu berdasarkan kategori yang sudah ada “(Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka melalui dinas sosial mengimplementasikan program PKH. Program Keluarga Harapan merupakan program dari pemerintah yang pelaksanaannya pun melalui proses dan tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Program Keluarga Harapan untuk memperdayaan masyarakat

miskin. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Berikut hasil wawancara bersama S Masyarakat Kabupaten Sika S Masyarakat Kabupaten Sikka

“ Pemerintah memberikan bantuan kepadad

“Kami menerima bantuan PKH dari pemerintah dengan jumlah yang masing masing itu berbeda sesuai dengan ketentuan yang sudah ada “ (Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

M Masyarakat Kabupaten Sika

“Bantuan yang di berikan kepada masyarakat sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan kami sehari-hari” (Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada indictor Strategi Tradisional Pemerintah Kabupaten Sika transparansi dalam melaksanakan progam PKH baik dalam pendataan masyarakat sampai dengan pada penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penyaluran bantuan pun dilakukan berdasarkan ketegori yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat.

b. Strategi Langsung

Kemiskinan erat kaitannya dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kemiskinan tidak hanya berhenti pada pengertian tersebut, karena kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di sebuah negara, seperti faktor

ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesempatan lapangan kerja, dan sebagainya.

Dalam menggerakkan program pengembangan kualitas hidup manusia, masalah kemiskinan merupakan tantangan yang sangat besar. Kemiskinan adalah masalah utama pembangunan ekonomi, karena itu pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah, bertujuan untuk memberantas kemiskinan di berbagai daerah di seluruh negeri. Namun, setiap program tidak sepenuhnya mampu memberikan harapan sempurna untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Model pemberdayaan masyarakat yang diberikan tidak mendidik orang untuk menjadi kreatif. Sebagian besar program memiliki lebih banyak amal, dalam bentuk pinjaman untuk menyediakan modal, dan lain-lain.

Program PKH diluncurkan pada tahun 2007 dan dikelola langsung oleh Kementerian Sosial dengan pengawasan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Tujuan utama dari PKH sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat bagi masyarakat miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Implikasi dari program PKH ini adalah dengan mengurangi dampak langsung dari konsumsi rumah tangga dan meningkatkan dampak pengembangan modal manusia. Berikut hasil wawancara bersama YP Sebagai Koordinator PKH Kabupaten Sika.

“Strategi Langsung yang dilakukan yaitu kami turun langsung dalam melakukan pendataan sehingga kami dapat melihat secara langsung apakah ini layak sebagai penerima program PKH yang sudah diprogramkan.” (Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Selanjutnya disampaikan YYE Sebagai Rencana Ahli Muda Sekretariat

“Dalam memberikan bantuan kepada masyarakat tidak semata-mata langsung diberikan saja tetapi ada kategori yang telah ditetapkan pemerintah pusat sehingga itu yang menjadi landasan dalam memberikan bantuan adapun kategori yang dimaksudkan itu diantaranya kondisi rumah yang kurang layak huni, penghasilan masing-masing kepala keluarga” (Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam indikator Strategi langsung Dinas Sosial Kabupaten Sikka turun langsung dalam mendata masyarakat miskin untuk menghindari terjadinya tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.

Selanjutnya hal serupa S Masyarakat Kabupaten Sikka

“iya untuk menerima bantuan itu dilakukan pendataan jadi ada yang datang ke rumah rumah masyarakat untuk melihat kondisi rumah dan juga jumlah keluarga dalam satu rumah itu berapa (Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Selanjutnya disampaikan M Masyarakat Kabupaten Sika

“Untuk menerima bantuan ada persyaratan adminitasinya melengkapi data kayak kartu keluragra dan surat keterangan miskin “(Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam indikator Strategi langsung dinas sosial turun langsung dalam melakukan pendataan kepada masyarakat dengan melihat berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan pemerintah pusat, kategori

kemiskinan berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022.

Tabel 4.2
Bantuan PKH kabupaten Sika

Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan (Tahun)
Bantuan Kesehatan:	
Ibu Hamil	Rp. 3000.000
Bantuan Pendidikan:	
SD	Rp. 900.000
SMP	Rp. 1.500.000
SMA	Rp. 2.000.000
Bantuan Kesejahteraan Sosial:	
Lansia	Rp. 2.400.00
Disabilitas	Rp. 2.400.00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sika (2022)

Tabel 4.3
Jumlah Penerima PKH

Tahun	Jumlah Penerima
2018	18.001
2019	16.212
2020	17.251
2021	19.047
2022	19.812

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap masyarakat yang diberikan bantuan berdasarkan kategori yang telah di tentukan pemerintah pusat kemudian di data sehingga program yang dilaksanakan tepat sasaran, sesuai yang diharapkan atau yang telah menjadi target ketentuan yang berlaku.

Adapun yang mengalami pengurangan dan penambahan jumlah penerima PKH itu sendiri dikarenakan juga sesuai ketentuan, yang mana pada tahap awal setiap penerima diberikan waktu tenggang selama sembilan bulan dengan jaminan perpanjangan kembali sembilan bulan dan seterusnya jika belum berdaya atau keluar dari kriteria kemiskinan. Yang mana sebagai target awal dari menteri sosial dengan harapan waktu tersebut agar masyarakat dapat berdaya dan keluar dari kriteria kemiskinan itu sendiri sehingga dapat diganti oleh masyarakat lain yang telah masuk dalam lingkaran kriteria kemiskinan itu sendiri.

Tabel 4.4
Jumlah Masyarakat Miskin Perkotaan
Penerima Bantuan PKH

Tahun	Jumlah Penerima
2018	563
2019	508
2020	580
2021	809
2022	1.156

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerima PKH di kabupaten Sika mengalami perubahan baik itu penambahan ataupun pengurangan di setiap tahunnya, adapun penambahan atau pengurangan dikarenakan beberapa masyarakat yang kemudian telah keluar atau sebaliknya ada yang malah masuk pada kriteria kemiskinan dari menteri sosial itu sendiri.

c. Strategi Transformatif

Dalam strategi pemberdayaan upaya diarahkan untuk memungkinkan orang menyadari akan hak-haknya, dan mengajari mereka mengenai cara mengolah hak-haknya, sehingga mereka lebih memiliki kemampuan dalam mengendalikan berbagai factor yang mempengaruhi kehidupannya.

Strategi pemberdayaan transformatif yaitu pemberdayaan yang berbasis pendidikan masyarakat secara partisipatif yang menekankan kesadaran-kesadaran kritis untuk menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan hubungan yang mutualistik.

PKH merupakan skema jaminan sosial bagi masyarakat miskin bahkan sangat miskin dalam menambah akses serta mutu kesehatan dan pendidikan berdasarkan dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam persyaratan selaku penerima PKH, Secara umum hal yang menjadi tujuan utama dalam program PKH yaitu mensejahterakan sumber daya manusia, memberikan pemahaman perilaku peserta

penerima PKH untuk mensejahterakan masyarakat, serta mengurangi masyarakat miskin.

Berikut hasil wawancara bersama YP Sebagai Koordinator PKH

Kabupaten Sika

“Dalam program PKH sendiri untuk Pendidikan telah dibagi jadi di setiap jenjang Pendidikan yang di dapat kan setiap anak itu dengan jumlah yang berbeda dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing dan itu juga sudah berdasarkan peraturan yang berlaku” (Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Selanjutnya disampaikan oleh YYE Sebagai Rencana Ahli

Muda Sekertariat

“Stategi transformatif yang dilakukan dinas sosial dalam program PKH sendiri yaitu dengan memberikan hak anak-anak yang kurang mampu tetap dapat memenuhi hak nya dalam Pendidikan dengan memberikan bantuan sesuai dengan jenjang Pendidikan yang meraka tempuh. (Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Selanjutnya di sampaikan Selanjutnya hal serupan S

Masyarakat Kabupaten Sikka

“Iya pemberian bantuan bukan hanya untuk kami yang lansia atau orang tua saja ada juga untuk anak anak yang masih sekolah jadi bisa di pakai untuk memenuhi kebutuhan sekolah kayak buku dan yang lainnya” Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada indikator transformatif dinas Sosial PKH dalam memberikan hak masyarakat khususnya pada pelajar dengan memberikan bantuan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh.selanjunya.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Strategi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kabupaten Sikka.

Upaya dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat tidak terlepas dari permasalahan atau faktor penghambat. Ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan meliputi pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya ditujukan untuk mempermudah akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengadakan proses produksi dan kesempatan berusaha. (Makiangung, 2016). Sehingga terdapat tiga hal pokok dalam pemberdayaan yaitu (1) Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual, (2) Akses yang mudah kesegala sumber daya pengembangan diri, (3) Organisasi dan kelompok yang selalu mendukung pengembangan diri.

Program keluarga harapan merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu pesertanya dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.

a. Faktor Penghambat

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh

pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah kabupaten Sika dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program PKH tentunya dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor penghambat. Berikut hasil wawancara bersama YP Sebagai Koordinator PKH Kabupaten Sika.

“Berbicara tentang faktor penghambat yaitu kurangnya jumlah pendamping PKH sehingga agak lambat dalam proses pendataan kemudian yang kedua yaitu adanya masyarakat yang sudah terdaftar ditahun sebelumnya dan pindah tapi tidak melapor sehingga sulit bagi kami untuk mendata kembali kemudian selanjutnya ada nya ketidak sesuaian antara data yang dimiliki dinas sosial dengan fakta di lapangan ”(Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Selanjutnya hal serupa di sampaikan oleh YYE Sebagai Rencana Ahli Muda Sekertariat

“untuk faktor penghambatan yang dialami pendamping PKH itu pada proses pendataan dimana ada perubahan data yang tidak ada konformasi Kembali sehingga data yang ada dengan data yang dilapangan itu berbeda “ (Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada faktor penghambat dinas sosial kabupaten sika dalam pembedayaan masyarakat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal , adapun faktor internal yaitu kurangnya pendamping PKH dan yang kedua adanya masyarakat yang terdaftar kemudian tidak

melapor sehingga menghambat proses pendataan ,selanjunya faktor eksternal adanya kesesuaian data dengan fakta yang ada dilapangan.

b. Faktor Pendukung

Penanganan kemiskinan yang ada diperlukan suatu program yang dapat memberdayakan masyarakat miskin. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaan program keluarga harapan tidak akan pernah terlepas dari faktor yang mendukung atau mensukseskan dalam pelaksanaannya. Berikut petikan dari beberapa pihak terkait tentang apa saja faktor pendukung pelaksanaan program keluarga harapan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program keluarga harapan di tunjukkan bahwa adanya tanggung jawab dan rasa kepedulian terhadap masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program keluarga harapan.

Berikut hasil wawancara bersama YP Sebagai Koordinator PKH

Kabupaten Sika

“Faktor pendukung program PKH sendiri itu tentunya yang pertama peran pendamping PKH ,kemudian Pemerintah daerah serta kemauan masyarakat untuk mau sama-sama bekerja sama dalam mempermudah dalam proses pendataan berbagi informasi terkait kelayakan masyarakat yang dapat menerima bantuan”(Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Selanjutnya hal senada disampaikan oleh YYE Sebagai Rencana

Ahli Muda Sekretariat

“Dalam pelaksanaan program PKH tentunya selain faktor penghambat ada juga faktor pendukung tentunya salah satu faktor pendukung yaitu adanya dana yang diturunkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena setiap tahunnya mengalokasikan dana untuk program PKH yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat “(Hasil wawancara pada 25 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa faktor pendukung dalam Program PKH dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sikka ada beberapa faktor diantaranya yaitu Peran Pendamping PKH ,Pemerintah daerah serta masyarakat.

C. Pembahasan

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai beberapa tahapan sehingga kegiatan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk mengurangi beban

pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan (Menteri Sosial, 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya Pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, sebagian upaya dari penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat, program ini diharapkan dalam jangka pendek mampu membantu keluarga miskin, mengurangi beban pengeluaran dan dalam jangka menengah diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Tujuan dari program ini adalah mengatasi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat peran Dinas Sosial yang menjadi aktor dalam menyukseskan PKH. Dinas Sosial yaitu suatu unit pemerintahan pada bidang sosial yang mengurus suatu kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program

pemberdayaan di sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Pada Penelitian ini mengenai Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan Kabupaten Sikka menggunakan teori menurut Menurut Hikmat (H. 2006) yang meliputi; strategi tradisional, strategi aksi langsung (*direct-action*) dan strategi transformatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Strategi tradisional pemerintah kabupaten Sika dalam pemberdayaan masyarakat miskin ,Dinas Sosial transparansi dalam melaksanakan program PKH baik dalam pendataan masyarakat sampai dengan pada penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penyaluran bantuan pun dilakukan berdasarkan kategori yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil Penelitian Strategi *direct-action*, Strategi langsung dinas sosial turun langsung dalam melakukan pendataan kepada masyarakat dengan melihat berdasarkan kategori-kategori yang telah di tentukan pemerintah pusat, kategori kemiskinan diukur berdasarkan 4 aspek dengan 9 kriteria fakir miskin menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022, yang mana terdapat beberapa indikator, diantaranya:

- a. Menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin.

- b. Kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari.
- c. Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.
- d. Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria, yaitu;
 - a) Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja.
 - b) Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir.
 - c) Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran.
 - d) Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir.
 - e) Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran.
 - f) Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng.
 - g) Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas.
 - h) Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 VA atau bukan listrik.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
2018	44,02
2019	43,32
2020	42,18
2021	43,09
2022	40,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka (2022)

Berdasarkan hasil penelitian Strategi transformatif dinas Sosial PKH dalam memberikan hak masyarakat khususnya pada pelajar dengan memberikan bantuan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh.

Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan Kabupaten Sikka.

1. Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan Kabupaten Sikka.

a. Pendataan

Faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten kepulauan Sika adalah proses pendataan yang tidak profesional, hal ini disebabkan karena data penerima bantuan yang tidak melapor ketika ada masyarakat yang pindah namun Namanya masih terdata sebagai penerima bantuan.

b. Keterbatasan SDM

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pemberdayaan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila didalam Pemerintah Daerah sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itu, pentingnya peran sumberdaya manusia dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam hal proses pendataan karena merupakan unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Daerah dalam program pemberdayaan masyarakat miskin.

2. Faktor Pendukung

a. Peran Pendamping PKH

Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat.

b. Ketersediaan Dana

Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Sika adalah ketersediaannya anggaran. Anggaran merupakan roda yang dapat menggerakkan kegiatan dalam pemberian bantuan masyarakat miskin. Ketersediaannya anggaran sangat mempengaruhi proses kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan Kabupaten Sikka dengan menggunakan teori menurut Hikmat (H. 2006) yang meliputi; strategi tradisional, strategi aksi langsung (*direct-action*) dan strategi transformatif.

- 1) Strategi Tradisional pemerintah kabupaten Sikka dalam pemberdayaan masyarakat miskin, Dinas Sosial transparansi dalam melaksanakan program PKH baik dalam pendataan masyarakat sampai dengan pada penyaluran bantuan kepada masyarakat
- 2) Strategi Aksi Langsung (*Direct-Action*) Strategi langsung dinas sosial turun langsung dalam melakukan pendataan kepada masyarakat dengan melihat berdasarkan kategori-kategori yang telah di tentukan pemerintah pusat
- 3) Strategi Transformatif Dinas Sosial PKH dalam memberikan hak masyarakat khususnya pada pelajar dengan memberikan bantuan sesuai dengan tingkat Pendidikan

Faktor penghambat strategi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kabupaten sikka ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal sedangkan faktor pendukung Peran Pendamping PKH, Pemerintah daerah serta masyarakat.

B. Saran

Sebagai saran pada hasil penelitian ini, agar:

1. Masyarakat sebaiknya dapat mengetahui dan menggukan bantuan PKH sebagai prioritas utama dalam menunjang keberdayaan pada kebutuhan utama dalam keluarga.
2. a. Pendamping PKH dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sudah cukup baik namun perlu adanya penambahan penamping. Penempatan pendamping sebaiknya dekat dengan domisili pendamping agar pendampingan lebih efektif tidak terkendala oleh jauhnya tempat pendampingan.
b. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali penyaluran bantuan PKH yang hari ini sudah secara langsung melalui Kartu PKH, yang dimana hal ini kurang terjadinya interaksi antara masyarakat dengan pendamping PKH atau pemerintah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kahar, A. B. D. U. L. (2016). *Kemiskinan Menurut M. Quraish Shihab* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Aprilia. (2018). *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arikunto, S. (2010). *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizah zuhratul, I. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Pada Masa Covid-19 Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah*. Seminar Nasional Paedagoria.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Damara, C., Nikmatullah, D., & Nurmayasari, I. (2015). *Strategi pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) di Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 3(3).
- Darmayanti, S. W. (2015). *Studi Deskripsi Tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sasaran Penerima Program Urban Farming Budidaya Lele Di Kelurahan Pakis*. (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- David, F. R. (2016). *Manajemen strategik: Suatu pendekatan keunggulan bersaing*. Jakarta: Salemba Empat.

- Djaelani, A. R. (2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20(1), 82-92.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*.
- Hikmat, H. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Humaniora*.
- <https://jdih.kemensos.go.id/common/dokumen/2022kmsosial262.pdf>
- Ilham, M. (2020). *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum*. diakses melalui <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi>.
- Indonesia, S. N. R. (2009). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*.
- Indonesia, M. S. R. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*.
- Khausar. (2012). *Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*.
- M, F. (2020). *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Perkotaan: Studi Pada Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Di Makassar*. Sumedang: Lisensi: Atribusi-Nonkomersial-Berbagiserupa.
- Mulyono, S. E. (2020). *Model pemberdayaan masyarakat miskin melalui jalur pendidikan non formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*. *Edukasi*, 14(1).
- Napitupulu, R. (2022). *Strategi Pemerintah Kota Manado Dalam Memberdayakan Masyarakat Menghadapi Pandemi Covid-19*.
- Pratama, Y. C. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia*.
- Primanto, A. (2020). *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).

- Rahabav, P. B, R. J. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Oleh Pemerintah Desa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Jap No.111 Vol. Vii.
- Reza, A. N. (2022). *Pengaruh Kemiskinan Dalam Perilaku Beragama Masyarakat Lampung Selatan*. An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. volume 2, nomor 2.
- Rusni djafar1, U. S. (2019). *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pohuwato*. Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.
- Sikka, B. P. (2021). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka*. Kabupaten Sikka: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tinggi, S. H. A. S. B. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat. Ekonomi Lingkungan*, 33.
- Undang-Undang. (2000). *Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*. LN Tahun, (206).
- Yohana, M. (2019). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kota Tanjung Balai*.
- Zuliyah, S. (2010). *Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah*. Journal of Rural and Development, 1(2)

L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara Pak Yustinus Kapitan (Koordinator PKH)





Wawancara Pak Yustinus Y. Edison
(Rencanana Ahli Muda Sekretariat)





Universitas
Muhammadiyah
Makassar

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisp@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisp.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 1152/A.3-II/VII/1443/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Muhammad Saibil

S t a m b u k : 10564 11007 17

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :
"Strategi Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kabupaten Sika"

Pembimbing I : Hamrun, S.IP, M.Si

Pembimbing II : Ahmad Taufik S.IP, M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, di serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar

Pada Tanggal : 22 Juli 2022

D e k a n,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730727.



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Sciences



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JLN.JENDERAL.A.YANI – TELP.(0382)21751 fax.(082)21655
 Maumere

SURAT KETERANGAN

NOMOR : Kesbangpol.070/111/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. NAMA : GUNTHERUS JIE EKA PARERA,S.STP
 b. NIP : 19921010 201406 1 001
 c. JABATAN : Kepala Bidang Politik

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : Muhammad Saibil
 KEBANGSAAN : INDONESIA
 PEKERJAAN : MAHASISWI
 ALAMAT : MAUMERE

Telah Selesai melakukan Penelitian dengan Judul "Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kabupaten Sikka. Sesuai surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 3231/05/C.4 Uni/XII/1444/2022 tanggal 09 November 2022 dan Surat Izin Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Nomor : Kesbangpol.070/941/XII/2022, tanggal 21 November 2022 serta Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka Nomor : Dinsos.800/916/XII/2022, Tanggal 29 Desember 2022

Ditetapkan di : Maumere
 Pada tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Sikka
 Pejabat Yang Mewakili,

GUNTHERUS JIE EKA PARERA,S.STP
 Penata
 NIP.19921010 201406 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai Laporan) ;
2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;



Universitas
Muhammadiyah
Makassar

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisp@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisp.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1916/FSP/A.1-VIII/XI/1444 H/2022 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rekt or, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Saibil
S t a m b u k : 10564 11007 17
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Dinas Sosial Kabupaten Sikka
Judul Skripsi : **“Strategi Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kabupaten Sikka”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 09 November 2022

D e k a n,
Ub. Wakil Dekan I


A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si
NIBM : 992 797



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS SOSIAL
Jln. El Tari - No. Tlp./Fax. (0382) 21884
MAUMERE

Maumere, 29 Desember 2022

Nomor : Dinsos.800/916/XII/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Kegiatan Penelitian

Kepada
Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar.

Berdasarkan Surat Izin Kesbangpol Kabupaten Sikka Nomor : Kesbangpol.070/941/XI/2022 tanggal 23 November 2022, bahwa Sdr. Muhammad Saibil Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan telah menyelesaikan Penelitian dengan judul **Strategi Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kabupaten Sikka**, selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.

Demikian Surat Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka,

DRS. RUDOLFUS ALI, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP 19661230 199412 1 002



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Saibil

NIM : 105641100717

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Juni 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyalaqul Hamidah, M.I.P.
NBM. 964391



BAB I Muhammad Saibil
105641100717
by Tahap Tutup

Submission date: 22-Jun-2023 05:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 2120818234

File name: BAB_I_5.doc (76K)

Word count: 1266

Character count: 8916

BAB I Muhammad Saibil 105641100717

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

4%

2

journal.ummat.ac.id

Internet Source

3%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Or

Exclude matches

Exclude bibliography

On



BAB II Muhammad Saibil

105641100717

by Tahap Tutup

Submission date: 23-Jun-2023 12:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2121258492

File name: BAB_II_5.doc (126.5K)

Word count: 3371

Character count: 23551

BAB II Muhammad Saibil 105641100717

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

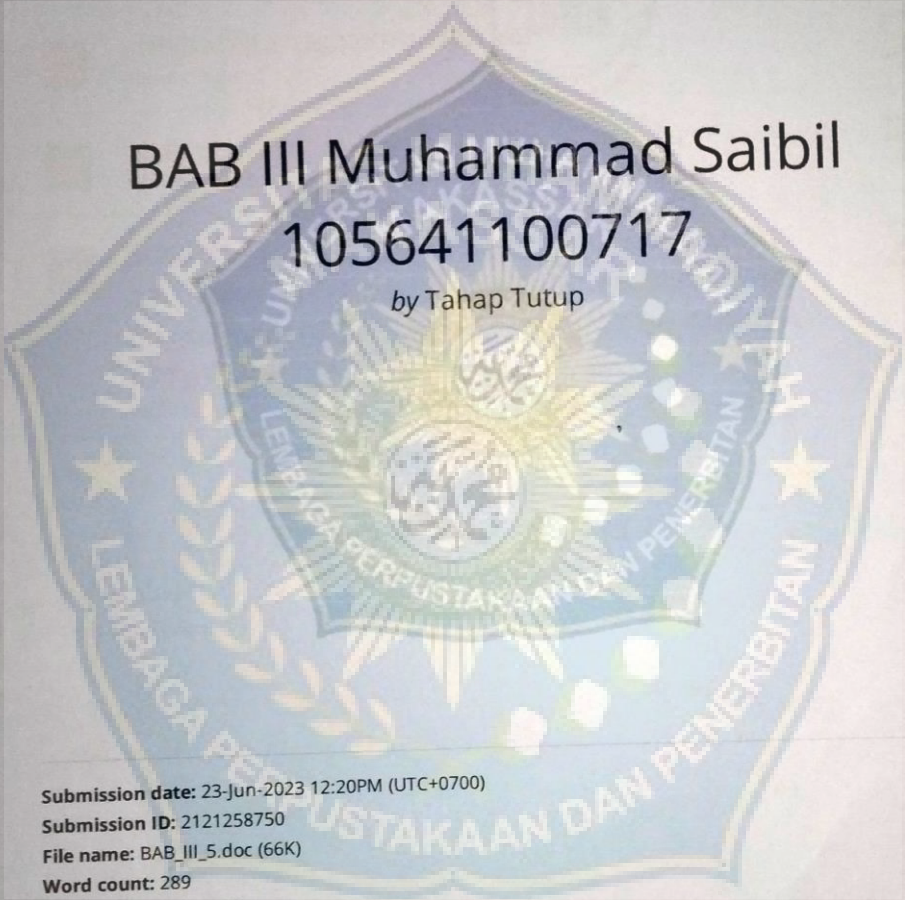
13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	4%
2	mynewmustafahusin.blogspot.com Internet Source	3%
3	society.fisip.ubb.ac.id Internet Source	3%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	3%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
6	journal.unnes.ac.id Internet Source	2%
7	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
8	jtmb.ejournal.unri.ac.id Internet Source	2%
9	riset.unisma.ac.id Internet Source	2%
10	jripto.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB III Muhammad Saibil
105641100717
by Tahap Tutup

Submission date: 23-Jun-2023 12:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 2121258750

File name: BAB_III_5.doc (66K)

Word count: 289

Character count: 1913

BAB III Muhammad Saibil 105641100717

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

unisbablitar.ejournal.web.id
Internet Source

5%

2

pt.scribd.com
Internet Source

3%

3

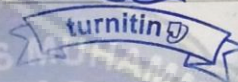
Susanti Susanti. "Faktor Penyebab Kelelahan dan Stres Kerja Terhadap Personel Air Traffic Controller (ATC) di Bandar Udara "X"", WARTA ARDHIA, 2017
Publication

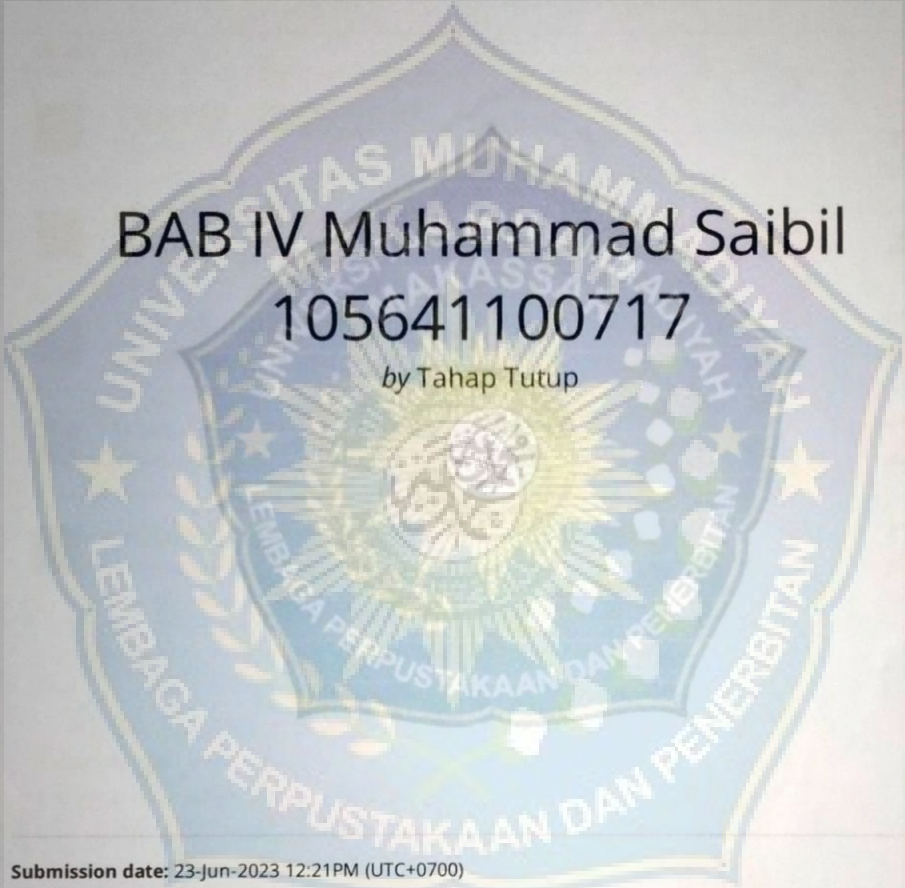
2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%





BAB IV Muhammad Saibil
105641100717

by Tahap Tutup

Submission date: 23-Jun-2023 12:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2121259084

File name: BAB_IV_5.doc (256.5K)

Word count: 3669

Character count: 24998

BAB IV Muhammad Saibil 105641100717

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	2%
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
3	journal.unnes.ac.id Internet Source	2%
4	www.cigentur.desa.id Internet Source	2%
5	publikasi.unitri.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%



turnitin

BAB V Muhammad Saibil 105641100717

by Tahap Tutup

Submission date: 23-Jun-2023 12:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 2121259451

File name: BAB_V_5.doc (55K)

Word count: 244

Character count: 1663

BAB V Muhammad Saibil 105641100717

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source



4%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches 2%



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Muhammad Saibil, disapa Saibil. Lahir pada tanggal 28 September 1996 di Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Anak ke tiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Muhiding dan Ibu Arwa, Penulis menempuh pendidikan SDN SUKUN Desa Samparong dan selesai pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan di MADRASAH TSANAWIYAH dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di MADRASAH ALIYAH Kabupaten Sikka dan selesai pada tahun 2015. Saat selesai pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2015 penulis memutuskan untuk istirahat dan menetap di Desa, dan melakukan kegiatan sebagaimana masyarakat Desa pada umumnya, pada Agustus 2017 penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penulis sangat berterimakasih kepada diri sendiri dan juga kepada para pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi penulis kesempatan menambah ilmu pengetahuan yang In Shaa Allah akan penulis amalkan. **Bismillahirrahmanirrahim.**